

## Daftar Pustaka

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an Al-Karim terjemahannya departemen Agama RI Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002.

Al-Qur'an Al-Karim terjemahannya departemen Agama RI CV. Penerbit Diponegoro. Bandung 2013.

### **Referensi Buku**

Abdullah. 2001. *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*. Jakatra: Gema Insani press.  
Adriansyah Irfan. 2017. *Dispartas pemidanaanaan dalam perkara tindak pidana korupsi (penyebab dan penanggulangannya)* Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan fikih sunnah sayyid saiq* Pustaka Al-Kautsar: Jakarta.

Ali Marus. 2011. *Dasa-dasar hukum pidana* Jakarta: Sinar Grafika.

Basrowi. Suardi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta.

Chazawi Adami. 2012. *Pelajaran hukum pidana bagian I* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Irfan M Nurul. 2016. *Hukum pidana Islam* Jakarta: Amzah.

Kartiwa Asep. 2014. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu Sebuah Sketsa*. Jakrta: PT Rajagrafindo Persada.

Kasiyanto Agus. 2018. *Teori dan praktik system peradilan TIPIKOR terpadu di Indonesia* Jakarta: Kencana.

Kasiyanto Agus. 2018. *Tindak pidana korupsi pada proses pada pengadaan barang dan jasa* Jakarta: Kencana.

Kelik Wardino, Natangsa Surbakti. Widi Famaliya Rachma. 2020. *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika* Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Koto Alaidin. 2006. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh* Jakarta: Raja Garfindo Persada.

Mardina. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

Marlin. 2011. *Hukum Panitensier* Medan: Rafika Aditama.

Miharja Husaimi. Marjan. 2008. *Penyalagunaan Wewenang Terkait Dengan Presedur Penangkapan Terhadap Korban Yangsalah Tangkap*. Jakarta: Qiara Media.

- Muchsin Agus. 2019. *Ilmu Fiqih Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik Dan Kontemporer*. Parepare: CV. Citra Wira Karya.
- Muslich Wardi Ahmad. 2005. *Hukum pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho Sigit Supto. 2019. *Sukma Hukum Keadilan Berhati Nurani*. Uwais Inspirasi Indonesia: Jawa Timur.
- Patilima Hamid. 2011. *Metode penelitian kualitatif* Bandung: cv. Alfabeta.
- Prakoso Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia* Yogyakarta: Liberty.
- Putusan Nomor: 81/Pid.Sus-Tpk/2019/PN Mks.
- Rusianto Agus. 2016. *Tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya* Jakarta: kencana.
- Saleh. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum* Makassar: CV. Sosial Politik Genius.
- Sengi Ernet. 2018. *Kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik di media social*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Siahaan Monang. 2019. *Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi Sidoarjo*: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sinaga Ali Imran, Nurhayati. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sujarwadi Tomy. 2018. Syahroni. Maharso., *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sunarso Siswanto. 2012. *Viktimologi dalam system peradilan pidana* Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin Amir. 2014. *Ushul Fiqh 2* Jakarta: Prenada Media Group.
- Tim penyusun Ensiklopedi Indonesia. 1980 *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito.
- Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra. 2015. *Mengenal penegakan hukum* Yogyakarta: Medpress Digital.

### **Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah**

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian Terbaru. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Republik Indonesia. 1981. Undang-Undang RI No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia. 2015. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Waliota.

Republik Indonesia. 2015. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 115/ktps/kpu/2015 tentang pedoman dana hibah pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.

### **Artikel Jurnal**

Ali Maulida. Didin Hafidhuddin. Ulil Amri Syafri. Abbas Mansur Tamam. 2020 tinak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidan Islam (Jurnal hukum Islam dan pranata social Islam. Vol.8.no.1.)

Auliya Sefri Muhammad Rezi. 2019, kontekstualitas korupsi dalam al-Qur'an . Tajdid vol. 22 no.2.

Azmi, Sofia. 2010. Tinda pidana korupsi terhadap penyelenggara pemilu provinsi Bangka Belitung perpektif hukum pidan positif dan hukum pidana Islam (analisis putusan no.727 K/Pid.sus/2010)

Erdianto. 2014. Meninjau kembali kebijakan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi Jurnal ilmu hukum vol.4.no.2.

Fazzan. 2015. Korupsi di Indonesia dalam Perspektif hukum pidana Islam, Jurnal ilmiah Islam nusantara. Vol.14.no.2.

Happy Febrina Hariyani. Dominicus Savio Priyarsono. Alla Asmara. 2016. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kaawasan Asia Pasifik Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, vol.5.no.2.

Noveydi Rumagit, Ralfie Pinasang.2020. Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik kepolisian negara republic Indonesia dalam pegadaan barang mesin saw mill tahun anggaran 2010 di kota Bitung (Lex Administratum, vol. VII no. 2).

Pasaribu, Achmad, Nashriana. (2019). Penegakan hukum pidan terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan operasiaonal sekolah (BOS) (20/Pid. Sus-tpk/2015/Pn Plg) (Doctoral dissertation, Universitas Sriwijaya).

Suherman, 2019. *SIGn Jurnal Hukum*. Vol. 1 No.1.

Sumarwoto. 2014. Tinjauan hukum pidan Islam terhadap tindak pidana korupsi. Fakultas Hukum Universitas Surakarta Vol.8 no.1.

Wattimena Husin. 2016. Perkembangan tindak pidana korupsi masa kini dan pengembalian kerugian keuangan negara Tahkim Vol. XII, No. 2.

Yunus, M. 2018. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Bnatuan Sosila di Pemerintah Provensi Sulawesi Selatan (studi putusan nomor:20/pid.sus/2012/Pn Makassar) (Docroral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.)

**Website resmi Online**

Pengadilan Negeri Makassar, Sistem Informasi Penelusuran Perkara Official Website <http://sipp.pn-makassar.go.id/>(17 juli2020).





# Lampiran-lampiran

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1621/In.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : IBRAHIM  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kaliang, 09 Februari 1998  
NIM : 16.2500.003  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Kaliang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA MAKASSAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Hukum Pidana Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 81/ Pid-sus-tpk/2019/Pn.Mks)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 September 2020

Dekan,




LAMPIRAN


PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS  
TANDA TERIMA SURAT  
Bagian/Kepaniteraan \_\_\_\_\_

TANGGAL TERIMA : 16.9.2020 .

ASAL/NO.SURAT : B.1621/En.39.6/PP-00.9/09/2020

PERIHAL : Izin penelitian, Ad. Ibrahim

YANG MENERIMA : \_\_\_\_\_ Silva. 



## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ibrahim

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid-Sus-Tpk/2019/PN MKS).

Pertanyaan yang di tujukan oleh narasumber:

1. Apakah kasus korupsi ini tergolong dalam kategori kasus korupsi rendah sehingga terpidana di vonis rendah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pemidanaan kasus korupsi ini yang di vonis rendah dari pada tuntutan jaksa?
3. Keterangan apakah yang disampaikan terdakwa di hadapan persidangan untuk membela dirinya?
4. Seberapa besar uang pengganti yang sudah di kembalikan oleh terpidana korupsi?
5. Bagaimana pendapat bapak terkait efektivitas pemidanaan kasus korupsi saat ini?

Makassar, 22 September 2020

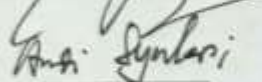
Pewawancara



Ibrahim

Nim: 16.2500.003

Informan/Narasumber





## LAMPIRAN

### Hasil Wawancara

Analisis hukum pidana Islam terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar (studi kasus putusan nomor:81/pid.sus-tpk/2019/Pn Mks)

Jabatan responden:

Nama: Andi Syukri Syukur, S.H., M.H

Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya/9 april 1962

Agama: Islam

Jabatan: Hakim Tipikor

1. Apakah kasus korupsi ini tergolong dalam kategori kasus korupsi rendah sehingga terpidana di vonis rendah? Kasus korupsi yang menjerat terdakwa termasuk kategori sedang. Sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 UU PTPK. Akan tetapi aturan ini tidak diberlakukan karena hukuman sudah berkekuatan hukum tetap sebelum PERMA itu disahkan.
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pemidanaan kasus korupsi ini yang di vonis rendah dari pada putusan jaksa? Hakim memvonis terdakwa dengan beberapa pertimbangan pertimbangan. Yaitu, 1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, 2. Terdakwa belum pernah dihukum, 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, 4. Terdakwa punya tanggungan keluarga.
3. Keterangan apakah yang disampaikan terdakwa dihadapan persidangan untuk membela dirinya? Terdapat pengeluaran oleh bendahara yang lama sebelum digantikan oleh terdakwa yang ia tidak ketahui. Untuk lebih lebih lengkap silahkan baca putusnya semuanya lengkap dari mulai penuntutan penuntut umum hingga amar putusnya.
4. Seberapa besar uang pengganti yang di kembalikan oleh terpidana korupsi? Untuk uang penggantian yang harus dikembalikan untuk Negara sebesar Rp.6.423.928.558. Untuk uang pengantinya di serahkan kepihak kejaksaan yang mengurusnya
5. Bagaimana pendapat bapak terkait efektivitas pemidanaan kasus korupsi saat ini. Tugas hakim yaitu untuk menyelesaikan kasus yang dibawah ke persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama menjadi hakim, semua aturan sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. Untuk pengawalan hukumannya diserahkan kepihak kejaksaan.

## LAMPIRAN



### PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Jl. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667  
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn-makassar@gmail.com  
M A K A S S A R 90111

Makassar, 22 September 2020

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U1/ 116 /PB.01/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

#### DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Ibrahim.**  
Tempat/Tgl. Lahir : Kaling, 09 Februari 1998  
N I M : 16.2500.003  
Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Kaling, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang  
Judul : **Analisis Hukum Pidana Hukum Islam Terhadap  
Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan  
Oleh Sekertaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota  
Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid-Sus-  
TPK/2019/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 17 September 2020 sampai dengan 22 September 2020.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare tanggal 16 September 2020 Nomor : B.1621/In.39.6/PP.00.9/09/2020.




WAKIL KETUA

**DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.**  
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

LAMPIRAN



**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
MAKASSAR**

PIDANA No. 81 / PHK.SUB.1/PK.2019 / PR Makassar  
TERDAKWA : Drs. Sabri

1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_  
4 \_\_\_\_\_  
5 \_\_\_\_\_  
6 \_\_\_\_\_  
7 \_\_\_\_\_  
8 \_\_\_\_\_  
9 \_\_\_\_\_  
10 \_\_\_\_\_

KETUA	<u>Darrel Ardiya, SH, MH</u>	NARI - HARI SIDANG
MAJELIS	<u>Fitri Heliana, SH, MH</u>	
HAKIM ANGG	<u>Andi Supri, SH, MH</u>	_____
_____	_____	_____
HANTENAN/P	<u>Qernawan Taher, SH</u>	_____
JAKSA P/1	<u>Fadiah, SH, MH</u>	_____
PUTUS TEL	<u>Selasa 21 Jan 2020</u>	_____
HUKUMAN	<u>Pidana Denda Rp 50.000.000,-</u> <u>Pidana Penjara 6 (enam) bln</u> <u>Pidana Tmn pnsy...</u>	_____
BANDING TEL	_____	_____
KASASI TEL	_____	_____



## LAMPIRAN

### PUTUSAN Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **Drs. Sabri** ;
- 2 Tempat lahir : Tadedde/Belopa ;
- 3 Umur /tanggal lahir : 51 Tahun/31 Desember 1967 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jl.Karunrung Raya V Nomor 4 RT/RW  
001/009 Kelurahan Karunrung Kecamatan  
Rappocini Kota Makassar
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : PNS (Sekretaris KPU Kota Makassar)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penahanan Penyidik , Sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
2. Perpanjangan JPU ,Sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar pertama , Sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar pertama. Sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum , Sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 08 September 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar (PLH.Ketua) , sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan 3 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Pertama, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020 ;

## DOKUMENTASI



Pemeriksaan Suhu Tubuh



Menunggu antrian

## DOKUMENTASI



Setelah wawancara dengan Hakim PN Makassar



Pengambilan Surat Keterangan Telah Selesai  
Melakukan penelitian

## RIWAYAT HIDUP



**Ibrahim** lahir pada tanggal 9 Februari 1998 di Desa Kaliang, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Prov. SulSel. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Muslimin dan Hasnaini. Penulis memiliki status kewarganegaraan Indonesia serta beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, yaitu pernah menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) di SDN 32 Kaliang selama enam tahun dan lulus pada tahun. Kemudian melanjutkan jejang pendidikan sekolah di SMPN 6 Duampanua dan lulus pada tahun 2013, Melanjutkan kembali jenjang pendidikan sekolah di SMAN 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi lagi di salah satu perguruan tinggi di Parepare yang disebut Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dari empat pilihan jurusan Fakultas, penulis memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSIH) dan juga memilih program studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Proses perkuliahan dimulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021 bulan januari. Tahap demi tahap dilalui hingga sampai pada tahap semester akhir dan bisa menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Analisis hukum pidana Islam terhadap penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sekretaris komisi pemilihan umum (KPU) kota Makassar (studi kasus putusan nomor : 81/pid.sus-tpk/2019/Pn Mks)”. Kegiatan penulis selama berkuliah dipenuhi dengan berbagai kegiatan-kegiatan organisasi, perlombaan-perlombaan, serta kegiatan disuksi yang bisa meningkatkan daya pikir otak.